



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN



STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI ANAK SECARA DARING (ONLINE CHILD PORN)

KHAIRUDDIN, SE, SH, M.Si
NDH. 20240707012362

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TK.II ANGKATAN XXXI TAHUN 2024**





Deskripsi Proyek Perubahan



Latar Belakang

Pornografi anak secara daring merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak yang terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Anak-anak sebagai kelompok rentan sering menjadi target utama, baik sebagai korban maupun objek eksploitasi. Kemudahan akses internet, lemahnya pengawasan, dan rendahnya literasi digital menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memiliki peran strategis dalam menangani ancaman ini. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, teknologi yang cepat berubah, dan kompleksitas jaringan kriminal yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi komprehensif untuk mencegah dan menangani kasus pornografi anak secara daring dengan efektif





Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri



Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu computer crime dan computer-related crime.

Computer crime adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (hacking), intersepsi ilegal (illegal interception), pengubahan tampilan situs web (web defacement), gangguan sistem (system interference), manipulasi data (data manipulation). Computer-related crime adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, seperti pornografi dalam jaringan (online pornography), perjudian dalam jaringan (online gamble), pencemaran nama baik (online defamation), pemerasan dalam jaringan (online extortion), penipuan dalam jaringan (online fraud), ujaran kebencian (hate speech), pengancaman dalam jaringan (online threat), akses ilegal (illegal access), pencurian data (data theft).

Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, Dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensik. Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standard mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang bukti digital. Oleh karena itu, Dittipidsiber juga melayani pemeriksaan barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat Mabes hingga Polsek. Selain itu, Dittipidsiber juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, guna memudahkan koordinasi dalam pengungkapan kejahatan siber yang bersifat transnasional dan terorganisir.





Visi Misi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri

Visi

Sebagai kesatuan terdepan yang bisa diandalkan dan siap melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi pada perangkat elektronik dan tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan teknologi informasi serta memberikan dukungan teknis penyelidikan dan penyidikan bagi kesatuan Polri lainnya

Misi

- ❑ Memperkuat & meningkatkan kemampuan personal & peralatan guna setiap saat siap melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap barang bukti digital yang terkait dengan tindak pidana terhadap perangkat elektronik dan/atau menyalahgunakan teknologi informasi
- ❑ Memberdayakan Kerjasama dengan stakeholder baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan organisasi Polri baik dari kalangan pemerintah maupun privat sektor yang bergerak di bidang teknologi informasi
- ❑ Mengembangkan metode pelayanan digital Forensic dan dukungan teknis lainnya kepada instansi pemena secara profesional, transparan dan akuntabel tanpa diskriminasi
- ❑ Memelihara peralatan dan infrastruktur yang berada di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber secara penuh tanggungjawab



... Gagasan Kreatif



Direktorat Tindak Pidana Siber sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik senantiasa berupaya meningkatkan pelayanannya demi kepuasan masyarakat di antaranya melalui pencegahan dan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Namun peningkatan pelayanan pencegahan dan penanganan pornografi anak belum maksimal. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada dibawah bareskrim polri yang bertugas untuk melakukan penegakan hukum hadap kejahatan siber.

Kondisi yang diharapkan

- Adanya unit khusus yang menangani tindak pidana yang menangani terkait pornografi anak;
- Adanya regulasi khusus tentang pornografi anak;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi personil dengan cara pelatihan;
- Tersedianya sarana dan prasarana khusus terkait pengembangan teknologi penanganan pornografi anak





Jangka Pendek (0-2 Bulan)

1. Terbentuknya tim efektif.
2. Tersedianya bahan dan materi terkait informasi dan data dari seluruh stakeholder
3. Tersedianya SOP tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak.
4. Terbitnya Surat Edaran dan Surat Telegram ke jajaran terkait pencegahandan penanganan pornografi anak.
5. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak
6. Tersedianya sarana dan prasarana IT.
7. Peningkatan SDM yang terlatih.
8. Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan pornografi anak kepada para stakeholder dan masyarakat.
9. Tersedianya brosur, banner dan stiker terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.
10. Terwujudnya koordinasi juga harmonisasi dan perubahannya agar praktik penanganan pornografi anak optimal dengan Lembaga-Lembaga terkait diantaranya Kemenko Polhukam, Kemendikbud, KemenPPA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenkumham dan KPAI



Jangka Mnengah (1 Tahun)

1. Terwujudnya MoU antara Dirtipidsiber Bareskrim Polri dengan Kementerian/Lembaga tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak
2. Terwujudnya interaksi berbasis IT antara Dittipid Siber Bareskrim Polri dengan stakeholder serta Masyarakat
3. Implementasi pencegahan dan penanganan pornografi anak pada Badan Reserse Kriminal Polri

Jangka Panjang (2 Tahun)

1. Tercapainya kesadaran Masyarakat dan pengguna jasa IT untuk melaporkan atau menginformasikan setiap kejadian tindak pidana pornografi anaka yang terjadi dengan menggunakan portal yang telah di miliki Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
2. Tercapainya pelayanan Bareskrim Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber berbasis IT yang terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses
3. Penangan pelaporan pornografi anak menjadi mudah, cepat dan tepat



Manfaat

Internal

- ➔ Tersedianya bahan dan materi terkait informasi dan data dari seluruh stakeholder
- ➔ Tersedianya SOP tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak
- ➔ Terbitnya Surat Edaran dan Surat Telegram ke jajaran terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.
- ➔ Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.
- ➔ Tersedianya sarana dan prasarana IT. Bareskrim Polri dengan Kementerian/Lembaga tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak



Eksternal ➔

- ➔ Masyarakat mendapatkan kemudahan informasi dan kecepatan dalam pencegahan dan penanganan kasus pornografi anak
- ➔ Adanya peningkatan pelayanan secara IT dan memberikan rasa aman dari ancaman kejahatan tindak pidana siber khusus pornografi anak





Milestone Proyek Perubahan Jangka Pendek

NO	TAHAPAN UTAMA	Bulan			OUTPUT	PERAN PROJECT LEADER	STAKEHOLDER
		September	Oktober	Nopember			
A	Jangka Pendek Waktu 2 Bulan	September	Oktober	Nopember			
1	Pembentukan Tim Efektif a. Rapat Pembentukan Tim Efektif b. Penyusunan Draft Sprint Tim Efektif c. Pengesahan Sprint Tim Efektif d. Pendistribusian Tugas Dan Sprint Tim Efektif				Terbentuknya Tim Efektif Dengan Sprint Tim Efektif	Menyusun tim efektif	
2	Tersedianya bahan dan materi terkait informasi dan data dari seluruh stakeholder				Terlaksananya Koordinasi Dengan Stakeholder Internal Dan Eksternal Dokumentasi Dan Notulensi	Memberikan sosialisasi dan pengarahan	
3	Tersedianya SOP tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak				SOP	Memimpin rapat rancangan dan finalisasi SOP	
4	Terbitnya Surat Edaran dan Surat Telegram ke jajaran terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.				Sosialisasi	Mengadakan pertemuan dengan jajaran	
5	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak				Focus Discussion Group (FGD)	Memimpin pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait	
6	Tersedianya sarana dan prasarana IT.				Adanya ruangan khusus yang menangani TP anak	Mengkoordinasikan dan melaporkan terkait penyiapan Srana dan Prasarana IT	
7	Peningkatan SDM yang terlatih.				Dokumentasi dan Laporan	Melaksanakan pelatihan untuk personil	
8	Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanganan pornografi anak kepada para stakeholder dan masyarakat.				Dokumentasi dan Laporan	Melaksanakan sosialisasi	
9	Tersedianya brosur, banner dan stiker terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.				Sosialisasi	Melaksanakan promosi terkait pencegahan dan penanganan pornografi anak.	
10	Terwujudnya koordinasi juga harmonisasi dan perubahannya agar praktik penanganan pornografi anak optimal dengan Lembaga-Lembaga terkait diantaranya Kemenko Polhukam, Kemendikbud, KemenPPA, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenkumham dan KPAI				Surat Dukungan	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait	





Milestone Proyek Perubahan Jangka Menengah

KEGIATAN	Sub Kegiatan	Bulan						OUTPUT	PERAN PROJECT LEADER	STAKEHOLDER
		Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025			
Adanya MoU antara Dirlitidsiber Bareskrim Polri dengan Kementerian/Lembaga tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak	a. Sosialisasi SOP tentang pencegahan dan penanganan pornografi anak							Undangan, bahan sosialisasi, notulen sosialisasi	Memimpin jalannya rapat	kementerian/Lembaga Terkait, Project Leader, Tim Efektif
	b. Pembuatan Laporan Hasil Sosialisasi							Notulen, Laporan	Mengarahkan tim efektif	Project Leader, Tim Efektif



Milestone Proyek Perubahan Jangka Panjang

KEGIATAN	Sub Kegiatan	Bulan						OUTPUT	PERAN PROJECT LEADER	STAKEHOLDER
		Tahun 2025				Tahun 2026				
		Mei-Jun 2025	Jul-Ags 2025	Sep-Okt 2025	Nov-Des 2025	Jan-Feb 2026	Mart-Apr 2026			
Tercapainya pelayanan Bareskrim Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber berbasis IT yang terselenggara dengan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses	a. a. Pembuatan MoU Kapolri c.q Kabareskrim							MoU	Berkordinasi dengan Dirlitidsiber dan mengarahkan Tim Efektif	Project Leader, Tim Efektif, Dirlitidsiber



...

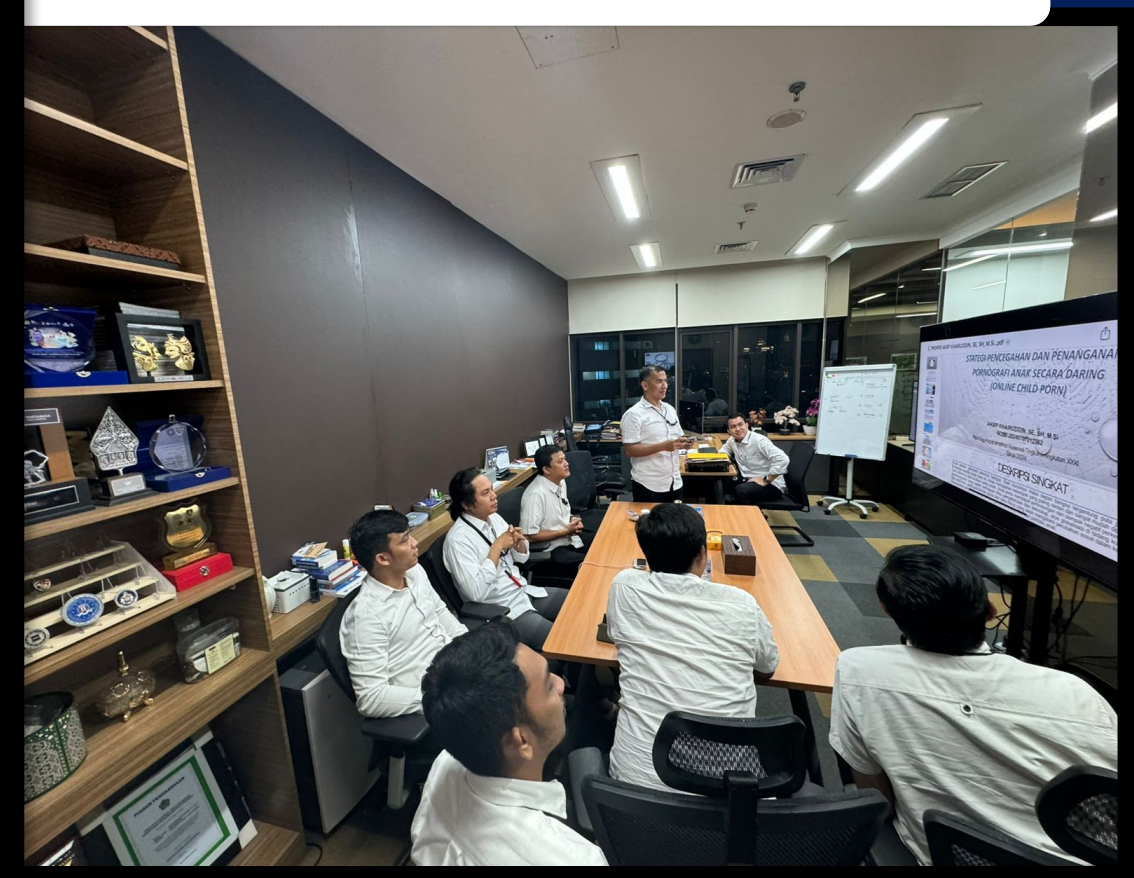
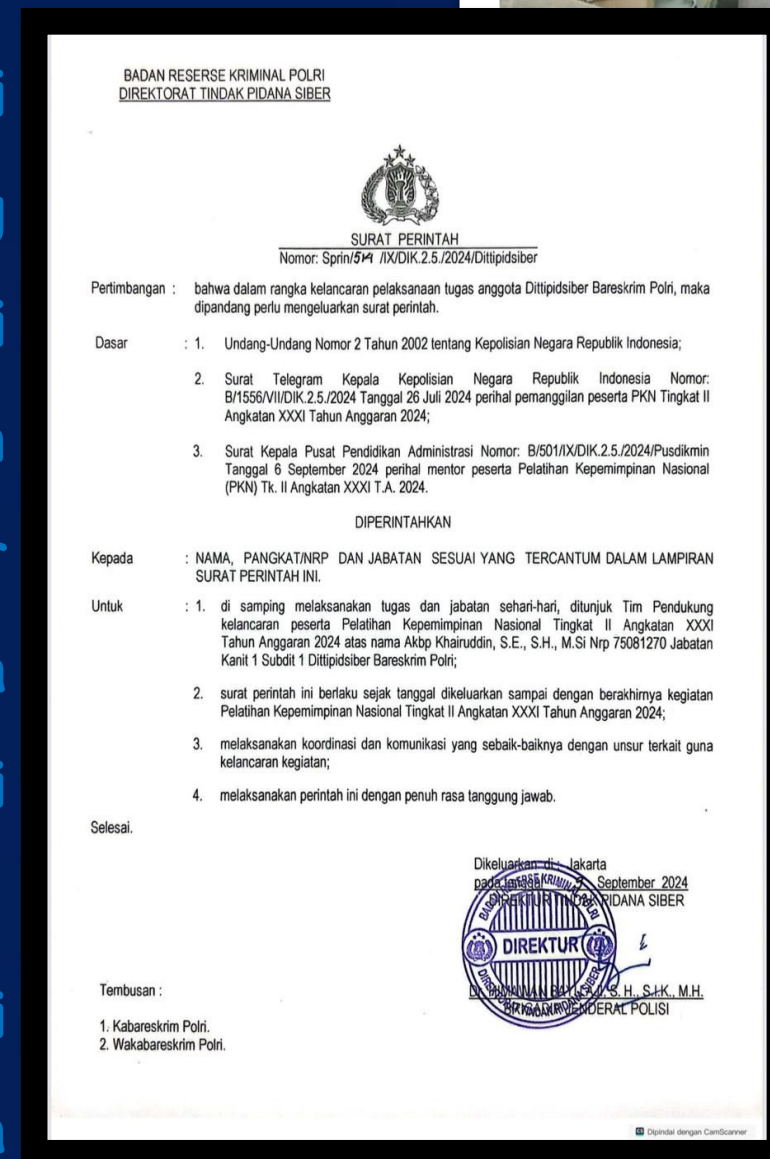
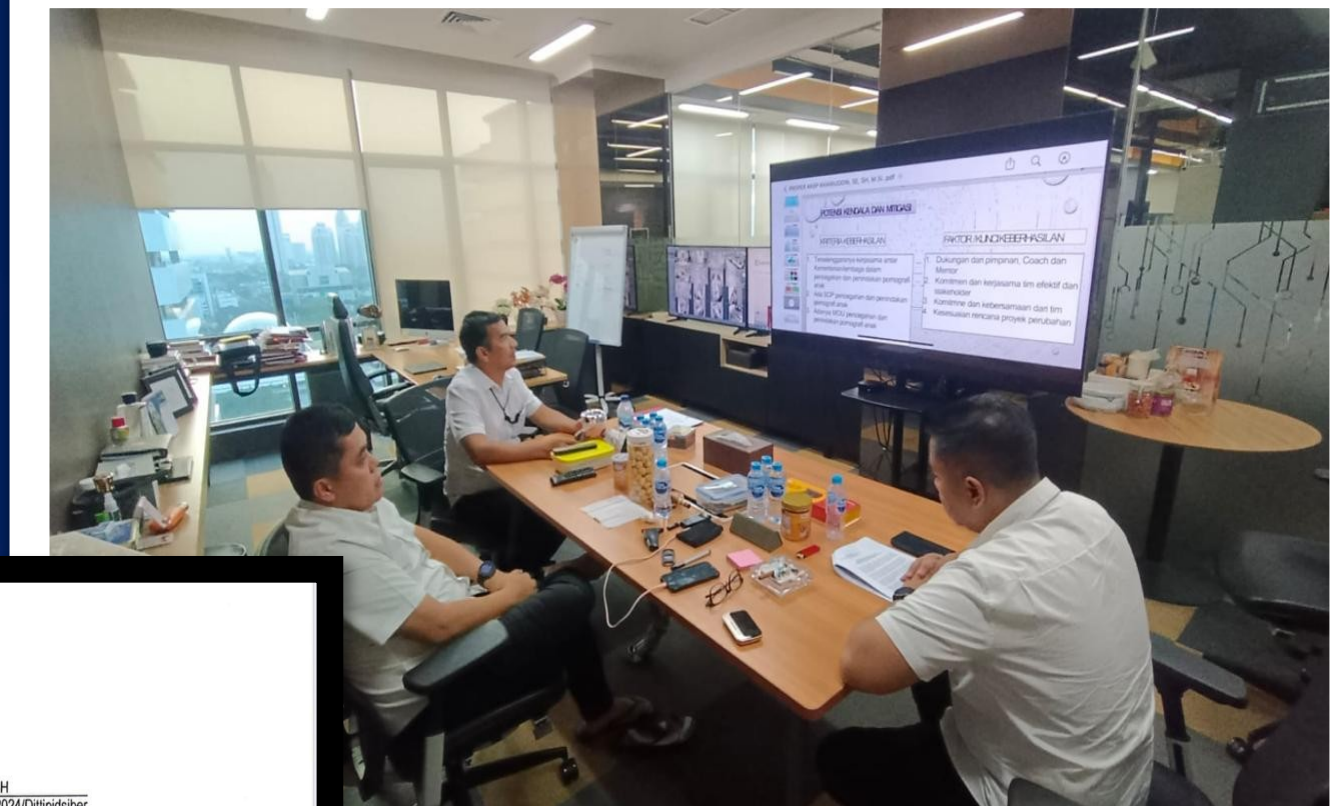
Capaian Implementasi Proyek Perubahan



... Terbentuknya Tim Efektif

Dalam mewujudkan pelaksanaan implementasi proyek perubahan ini perlu pembentukan tim yang efektif yang merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan setiap tahapan untuk mencapai tujuan dengan bimbingan mentor sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman eksploitasi dunia maya.

Dengan disetujui konsep proyek perubahan ini diterbitkan Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri



JADWAL AKTIVITAS MASA MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA		
NO.	WAKTU/TEMPAT	STAKEHOLDERS EKSTERNAL
1.	Kamis, 05 September 2024 Pukul. 13.00 Wib di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	KEMENKOMINFO RI RADYKA PRIMA WICAKSANA Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Ditjen Aptika ALIFA NINDITA DIWASARI Analisis Konten Media Sosial
2.	Kamis, 05 September 2024 Pukul. 16.00 Wib di Kantor Kementerian Sosial RI (Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak)	KEMENSOS RI HASRIFAH MUSA Pekerja Sosia Ahli Madya Direktorat Rehabsos Anak
3.	Jumat, 06 September 2024 Pukul. 10.00 Wib di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	KPAI <i>Drs. KAWIYAN, M.I.Kom</i> <i>Anggota KPAI</i>
4.	Jumat, 06 September 2024 Pukul. 14.00 Wib di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	KEMENPPPA TYAS FIDELIA Tenaga Layanan Paralegal Deputi Bidang Perlindungan Khusus anak
5.	Jumat, 06 September 2024 Pukul. 17.00 Wib di Kantor NGO (Non-Governmental Organization) Yayasan OUR Rescue Indonesia Raya	NGO (Non-Governmental Organization) Yayasan OUR Rescue Indonesia Raya ZULFAHMI RAMLI Ketua Yayasan OUR Rescue Indonesia Raya

Keberhasilan proyek perubahan ini sangat bergantung pada keterlibatan dan komitmen berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal. Kerja sama yang solid antara pihak-pihak terkait akan memastikan implementasi strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani pornografi anak secara daring.

Membangun komitmen bersama ini akan menciptakan sinergi yang kuat, sehingga proyek perubahan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata dalam perlindungan anak-anak Indonesia dari ancaman eksploitasi dunia maya.

JADWAL AKTIVITAS MASA MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA		
NO.	WAKTU/TEMPAT	STAKEHOLDERS INTERNAL
1.	Rabu, 04 September 2024 di Kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri	BRIGJEN POL Dr. HIMAWAN BAYU AJI, S.H., M.H. DIREKTUR TIPIDSIBER BARESKRIM POLRI
		KOMBES POL DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M. WAKIL DIREKTUR TIPIDSIBER BARESKRIM
		KOMBES POL JEFFRI JUNIARTA, S.I.K., S.H., KASUBDIT I DITTIPIIDSIBER BARESKRIM P (MENTOR)

Membangun Komitmen Bersama Stakeholder Internal & Eksternal



... Stakeholder Internal



STAKEHOLDERS INTERNAL



BRIGJEN POL Dr. HIMAWAN BAYU AJI, S.H., S.I.K., M.H.
DIREKTUR TIPIDSIBER BARESKRIM POLRI

Menyampaikan untuk Proyek Perubahan dengan Strategi pencegahan dan penanganan pornografi anak online yang saat ini akan dilaksanakan dengan cara melihat kondisi saat ini di Direktorat Tindak Pidana Siber dimana untuk laporan/pengaduan baik yang disampaikan oleh Masyarakat melalui website Patroli Siber yang sudah tersedia cukup banyak dan juga data/informasi yang diberikan oleh NGO (Non-Governmental Organization) yang saat ini mendukung dalam penanganan tindak pidana pornografi anak juga sebagai bahan melakukan penyelidikan yang akhirnya dilakukan penindakan sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga dan NGO untuk bagaimana cara pencegahan dan penanganan terkait Pornografi anak.

Terkait dengan penyidik yang masih kurang dalam menangani baik pencegahan ataupun penindakan perlu diusulkan/disampaikan kepada Kabareskrim untuk dapat ditambah sehingga penanganan lebih efektif

Perlu adanya pelatihan dan pedoman/SOP dalam penanganan terkait pornografi anak baik anak sebagai korban maupun pelaku

STAKEHOLDERS INTERNAL



KOMBES POL DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum.
WAKIL DIREKTUR TIPIDSIBER BARESKRIM POLRI

Perlu adanya pedoman bagi penyidik dalam menangani suatu perkara terkait pornografi anak online kemudian melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam hal pendampingan pada saat dilakukan pemeriksaan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dan juga dilakukan asesmen sampai anak dapat melakukan aktifitas dilingkungannya Disarankan juga untuk dapat dibuatkan tempat khusus dalam melakukan pemeriksaan anak selaku korban maupun pelaku sehingga anak tidak merasa malu dan canggung.



Stakeholder Eksternal

STAKEHOLDERS EKSTERNAL



KPAI
Drs. KAWIYAN, M.L.Kom
Anggota KPAI




Tugas KPAI salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Ketika ada laporan masuk ke KPAI maka saya dan teman-teman yang ada di KPAI akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kepolisian ataupun Lembaga-lembaga yang menangani anak dalam melakukan penanganan anak. Adanya beberapa contoh kasus yang salah satunya di tangani Polda Metro Jaya dimana penyidik melakukan penanganan kasus terkait penjualan foto dan video anak di media sosial dan pelaku juga seorang anak. Penyidik melakukan penangkapan di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya (wilayah Kalimantan) kemudian anak tersebut dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Permasalahannya yang timbul Ketika penyidik tidak berkoordinasi dengan Kepolisian wilayah dan Lembaga yang membimbing anak di Wilayah tempat melakukan penangkapan sehingga untuk penanganan anak tersebut pasca penangkapan tidak dilakukan penanganan secara intensif dan tidak dilakukan asesmen terhadap anak, hal tersebut bisa berdampak negatif terhadap anak sebagai pelaku.




STAKEHOLDERS EKSTERNAL

KEMENSOS RI
HASRIFAH MUSA
Pekerja Sosia Ahli Madya Direktorat Rehabosos Anak

Terkait penanganan Anak yang terkait dengan pornografi beberapa Kementerian/Lembaga sudah bekerjasama dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus dimana ada 15 cluster salahsatunya anak korban pornografi, Untuk pedomanan penanganan anak sudah ada Undang-Undang perlindungan anak yang mengatur, diKemensos ada 31 unit teknis Dimana salah satu UPT yang dinamai sentra handayani yang menangani anak dengan cara pendekatan, untuk penanganan rehabilitasinya unit ini menerima rujukan dari Kepolisian atau Lembaga2 lainnya untuk dilakukan penanganan dan ada juga program terkait program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yaitu layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residential. Untuk pedomanan penanganan atau SOP (Standar Operasional prosedur) pornografi anak Kementerian/Lembaga belum ada sehingga diperlukan pembahasan bersama terkait penanganan pornografi anak.

STAKEHOLDERS EKSTERNAL

KEMENKOMINFO RI
RADYKA PRIMA WICAKSANA
 Ketua Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal Ditjen Aptika
ALIFA NINDITA DIWASARI
 Analis Konten Media Sosial

Pihak Kemenkominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap konten-konten pornografi anak dapat dilakukan apabila ada pelaporan dari pihak Kepolisian ataupun Kementerian/Lembaga yang laporan tersebut ditampung dalam wadah sistem aduan Instansi K/L dimana nantinya akan dianalisa oleh tim analis konten media sosial apakah konten tersebut masuk konten anak atau konten negatif lainnya, apabila konten tersebut masuk maka Tim akan melakukan pemblokiran dalam waktu cepat (4 jam saat pelaporan masuk) sedangkan untuk konten negatif lainnya akan dilakukan pemblokiran dalam waktu 1X24 jam.

Masyarakat juga dapat melaporkan adanya konten-konten pornografi anak maupun konten negatif lainnya di di aplikasi Kemenkominfo "aduankonten" dengan melakukan pendaftaran pelapor terlebih dahulu sehingga dapat diketahui pelapornya siapa dan kontennya apa.



Tim pengendalian konten ilegal/negatif tersebut bekerja selama 1X24 jam dimana pengawasan dan pengendalian di lakukan oleh Ketua Tim dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika




STAKEHOLDERS EKSTERNAL

NGO (Non-Governmental Organization) Yayasan OUR Rescue Indonesia Raya
ZULFAHMI RAMLI
Ketua Yayasan OUR Rescue Indonesia Raya

Tim OUR mendukung kegiatan dalam menangani dan mencegah kejahatan pornografi anak secara online dimana salah satu program OUR yaitu melindungi anak-anak seluruh dunia dari kejahatan anak baik secara online dan offline. Tim OUR menjalin Kerjasama dengan penegak hukum (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri) dengan memberikan data terkait kejahatan anak untuk dilakukan penanganan dengan cara penindakan, mengadakan pelatihan kepada penyidik untuk memahami penanganan anak dan penggunaan alat digital untuk pengungkapan dengan mengundang ahli baik terkait perundang-undangan maupun ahli dalam


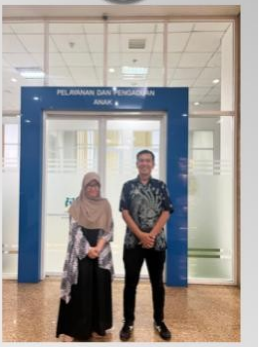





STAKEHOLDERS EKSTERNAL

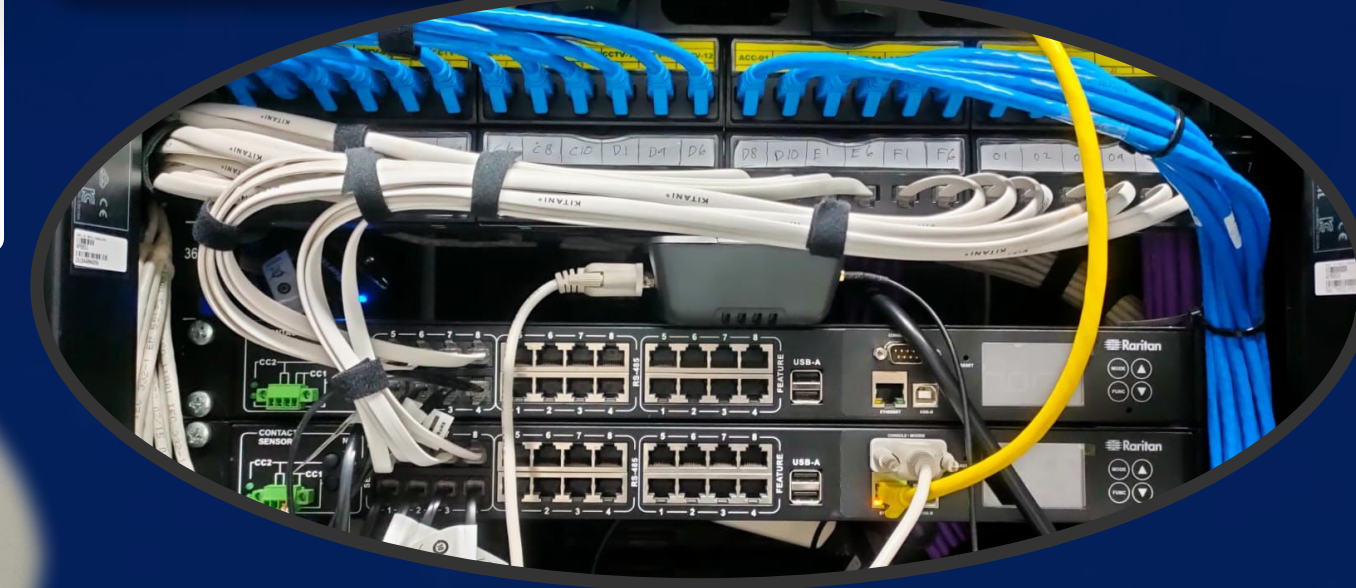
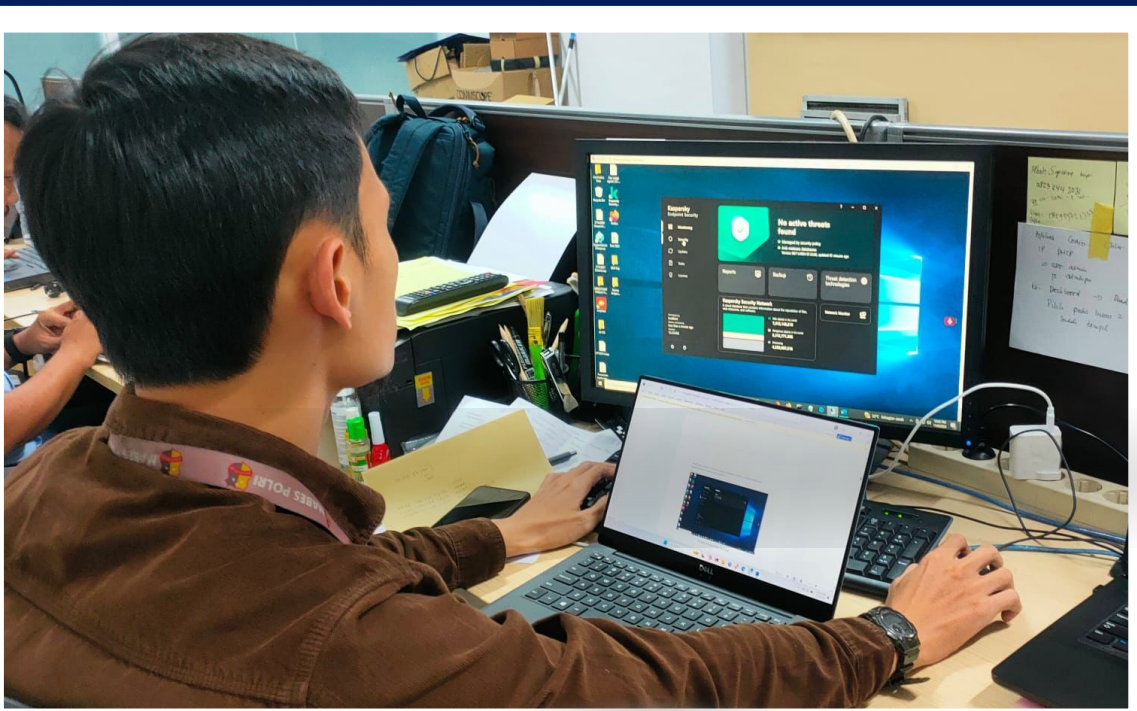
KEMENPPPA
TYAS FIDELIA
 Tenaga Layanan Paralegal Deputi Bidang Perlindungan Khusus anak

Menyampaikan bahwa KemenPPPA banyak menerima kasus-kasus terkait anak dan mempunyai kendala saat untuk menghubungkan dengan pihak Kepolisian dikarenakan pelaku tidak diketahui keberadaannya ada dimana, korban juga tidak mengetahui dikarenakan korban anak tersebut berkenalan dengan pelaku melalui media sosial (telegram, Michath dll), terkadang dari kami mengarahkan untuk ke Kominfo dengan call center untuk minta dilakukan pemblokiran padahal video ataupun foto mereka belum pada tahap ada di medsos tetapi ketakutan mereka akan disebar, anak-anak tersebut takut menyampaikan kepada orang tua ataupun saudaranya. Kami dari pihak KemenPPPA memberikan Solusi untuk dilakukan penanganan phisikologisnya karena anak-anak tersebut mendapatkan ancaman dari pelaku.

Kami dari KemenPPPA belum ada pedoman/SOP terkait penanganan anak secara kebersamaan baik dari aparat penegak hukum dengan Kementerian/Lembaga dan diharapkan bisa dilakukan pembahasan secara Bersama-sama agar penanganan terhadap anak dapat berkelanjutan secara Bersama-sama.

Kesiapan Sarana & Prasarana IT



Penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi (IT) yang mumpuni merupakan komponen krusial dalam proyek ini. Efektivitas pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang canggih, terintegrasi, dan mampu mendukung investigasi serta pencegahan kejahatan secara real-time

Dengan kesiapan sarana dan prasarana IT yang memadai, proyek ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan ramah anak, sekaligus memberantas pornografi anak secara daring dengan efektif.



Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan penyidik



Pelatihan peningkatan kemampuan penyidik merupakan langkah strategis dalam proyek perubahan ini untuk memastikan bahwa seluruh personel memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus pornografi anak secara daring. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, keterampilan investigasi digital, dan pemahaman hukum yang relevan sehingga dalam melakukan penyidikan paham bagaimana melakukan serangkaian kegiatan penyidikan sampai dengan selesai.



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/197/XX/RES.2.5/2024/Ditpidasiber

Portmangan : bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pelatihan Pengungkapan Kasus Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan Berbasis Software Intelejen Digital menggunakan hukum dan peranggulangan pornografi anak online.

Dasar : 1. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/RES/2024/RES.2.5/2024 tanggal 23 Mei 2024 tentang Jukrah upaya penegakan hukum dan peranggulangan pornografi anak online;
2. Surat ketua yayasan OUR Rescue Indonesia Nomor: OUR INDO 124-08-05 tanggal 27 Agustus 2024 hal undangan pelatihan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Perempuan dan Anak Menggunakan Metode Serta Alat-Alat Modern;

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI;

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Pengungkapan Kasus Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak dan Perempuan Berbasis Software Intelejen Digital menggunakan Maltego (aplikasi untuk melakukan open source intelligence (OSINT) dan TRM (Blockchain intelligence yang memungkinkan penagak hukum untuk mendeteksi aliran crypto maupun mendeteksi kegiatan crypto) yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 September 2024, di Sheraton Senogigi Hotel, Jalan RTA Raya Senogigi No. 8, Senogigi, Lombok Barat, NTB;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 September 2024

DIREKTOR TINDAK PIDANA SIBER
DR. H. ALI HUDAIB, S.H., S.I.K., M.H.
BRIKOR TINDAK PIDANA SIBER

Tembusan:
Kabareskrim Polri.

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIREKTOR TINDAK PIDANA SIBER
NOMOR: Sprin/197/XX/RES.2.5/2024/Ditpidasiber
TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2024

DAFTAR NAMA PERSONEL

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	KETERANGAN
1.	JEFFRI DIAN JURNARA, S.H., S.I.K., M.H.	KOMBES POL/7400709	KASUBDIT I DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	KETUA TIM
2.	KHARUDDIN, S.E., S.H., M.Si	AKRIB/75081270	KARYA SUBDIT I DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
3.	JHEHAN SEPTIANO BORTI Leksana, S.Pd., M.H.	AKP/91010293	BHAYANGKARA OPERASIONAL DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
4.	KADEK PANDE APRIDYA WIRIANA, S.I.K., M.H.	AKP/9040403	UNIT 4 SUBDIT 3 PALUR SUBRACONS DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
5.	IZULKIFLY HARIRAN PARUKI, S.T.	IP1U/94011102	PANIT IV SUBDIT I DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN
6.	YANDAR WICAKSONG, S.Tr.K., S.I.K.	IP1U/95011185	BHAYANGKARA OPS PELAKSANA PEMULA UNIT II SUBDIT II DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN
7.	ERESTU PRANANDA, S.Sos., M.T., M.Sc.	IP1U/95031078	BHAYANGKARA OPS PELAKSANA PEMULA UNIT I SUBDIT III DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN
8.	RYAN KUSHERVIAN BASYID, S.Tr.K., S.I.K., M.Si., M.T.	IP1U/95091193	BHAYANGKARA OPS PENYELIA UNIT I SUBDIT III DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN
9.	DIMAS ADI SAFUTRA, S.Kom.	IP1U/9401277	PANIT V SUBDIT III DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN
10.	ILHAM URANI AZIS, S.Tr.K.	IPDA/90060853	BHAYANGKARA OPS PENYELIA UNIT II SUBDIT I DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN

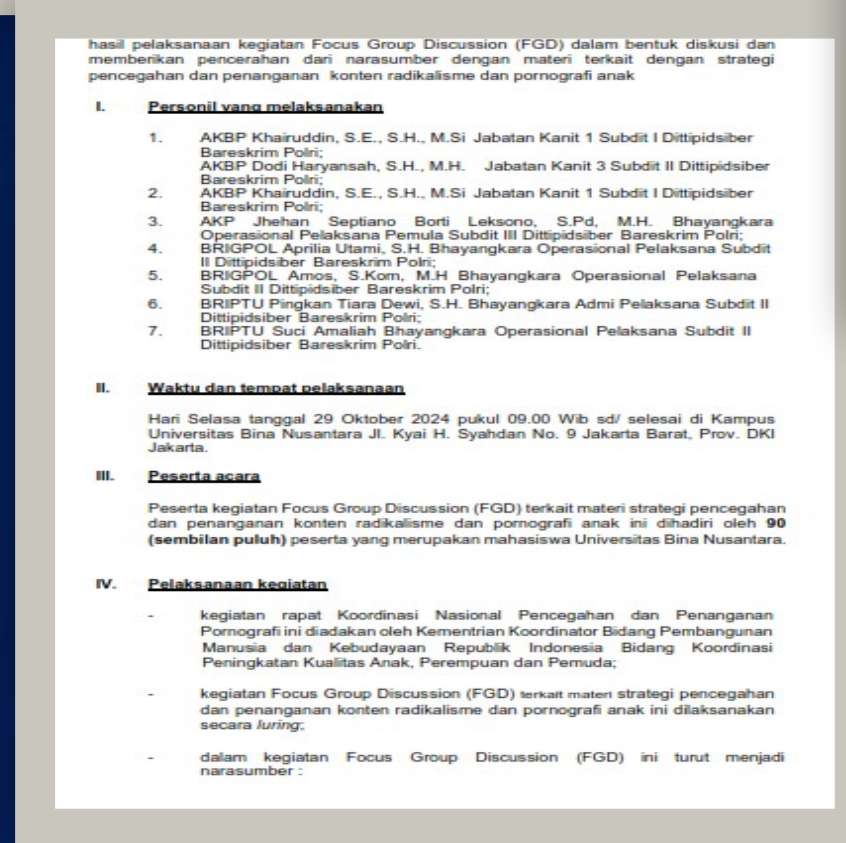
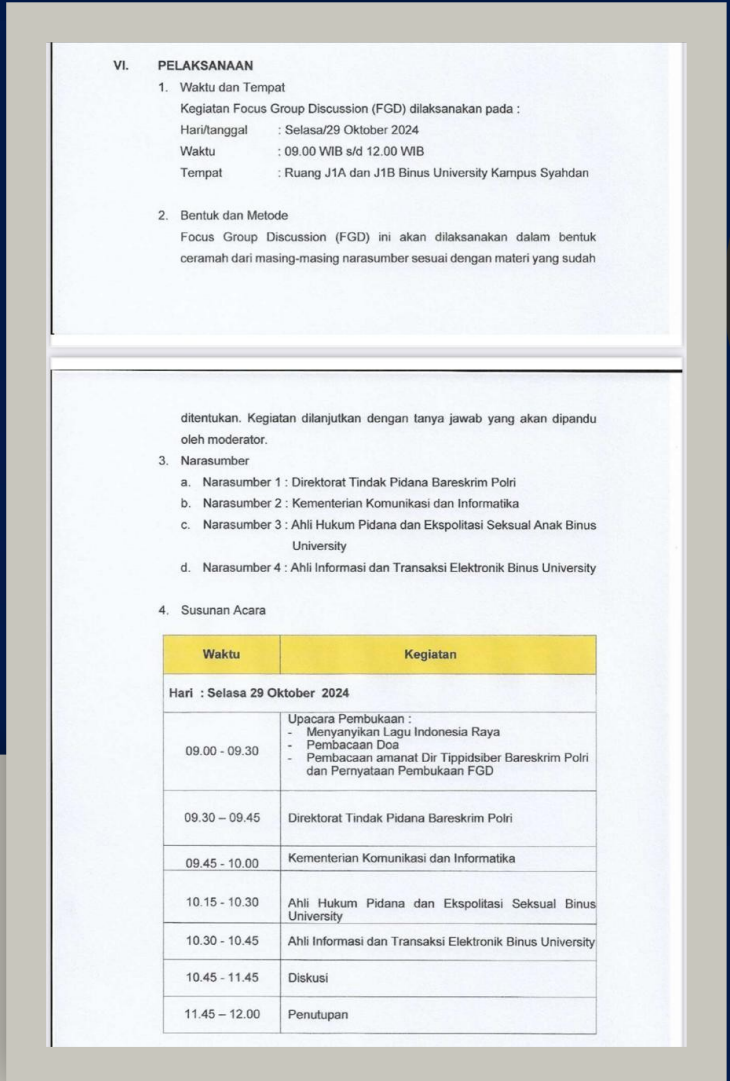
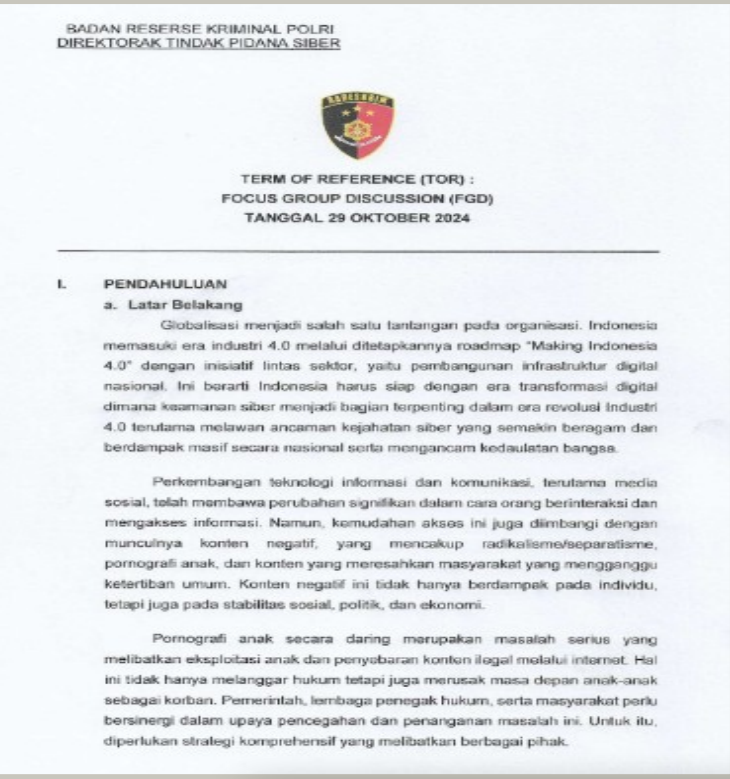
11. ERLANGGA

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIREKTOR TINDAK PIDANA SIBER
NOMOR: Sprin/197/XX/RES.2.5/2024/Ditpidasiber
TANGGAL: 13 SEPTEMBER 2024

1	2	3	4	5
11.	ERLANGGA DWIPUTRA HERMAN	BRP/TL/010018	BHAYANGKARA OPS PELAKSANA PEMULA UNIT IV SUBDIT I DITPIDASIBER BARESKRIM POLRI	PESERTA PELATIHAN

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 September 2024

Penyiapan Petunjuk Teknis (SOP) & FGD



Implementasi Strategi Marketing





**BADAN RESESE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA SIBER**

Nomor Sop : 8/XI/2024/Dittipidsiber
 Tanggal Pembuatan : 05 Nopember 2024
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Pengesahan : 12 Nopember 2024
 Disahkan Oleh :
 Direktur Tindak Pidana Siber

B.H.
Dr. HIMAWAN BAYU ANI S.H., S.I.K., M.H.
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

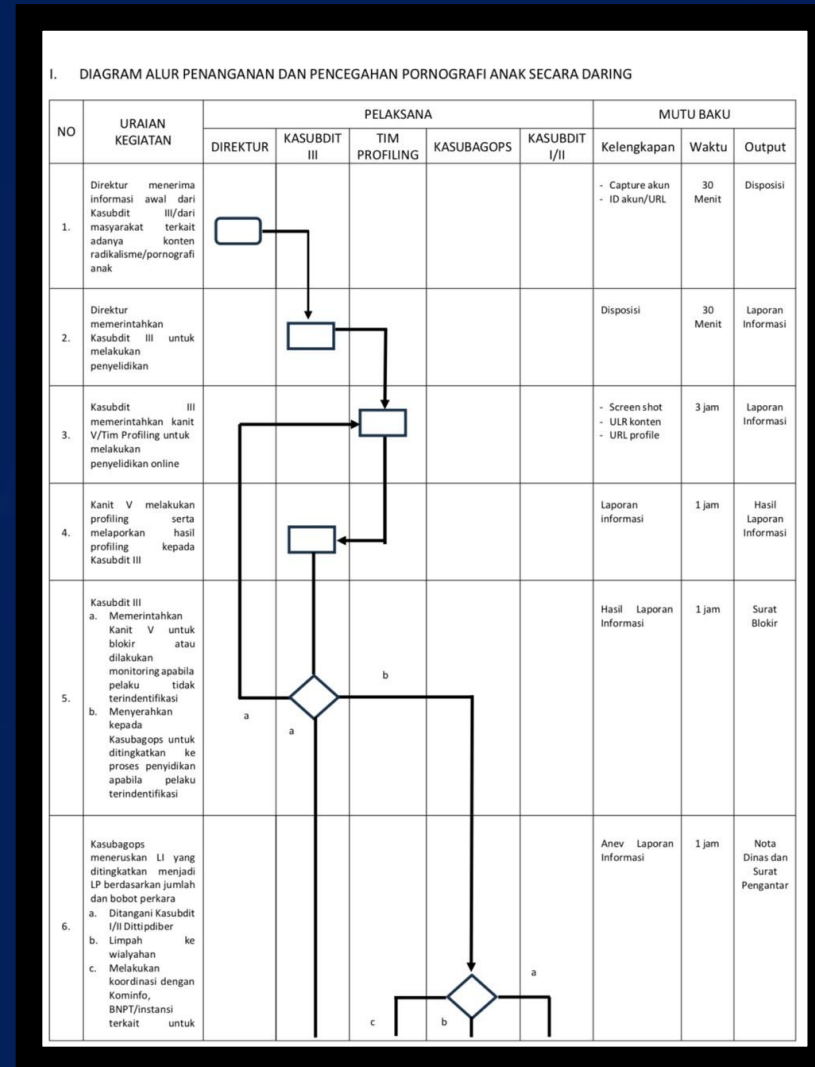
Nama SOP : **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 PORNOGRAFI ANAK SECARA
 DARING**

Dasar Hukum :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. UU RI No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. UU RI No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keterkaitan :

Peringatan :



dilakukan upaya lain																			
d. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa berita tsb adalah hoaks melalui Div Humas Polri dan BIK dilakukan upaya lain																			
7. Kasubdit I/II melakukan penyidikan																			
8. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Direktur																			

II. MEKANISME KEGIATAN

1. Direktur menerima informasi awal dari Kasubdit III/dari masyarakat terkait adanya konten pornografi anak
2. Direktur memerintahkan Kasubdit III untuk melakukan penyelidikan
3. Kasubdit III memerintahkan Kanit V/Tim Profiling untuk melakukan penyelidikan online
4. Kanit V melakukan profiling serta melaporkan hasil profiling kepada Kasubdit III
5. Kasubdit III :
 - a. Memerintahkan Kanit V untuk blokir atau dilakukan monitoring apabila pelaku tidak teridentifikasi
 - b. Menyerahkan kepada Kasubagops untuk ditingkatkan ke proses penyidikan apabila pelaku teridentifikasi
6. Kasubagops Meneruskan LI yang ditingkatkan menjadi LP berdasarkan jumlah dan bobot perkara :
 - a. Ditangani Kasubdit I/II
 - b. Limpah ke wilayahan
 - c. Melakukan koordinasi dengan BNPT, Kominfo atau instansi terkait untuk dilakukan upaya lain
 - d. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa konten tersebut adalah hoaks melalui Divisi Humas dan ke BIK untuk dilakukan upaya lain
7. Kasubdit I/II melakukan penyidikan
8. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada Direktur

MODUL

STRATEGI
 PENCEGAHAN & PENANGANAN
 PORNOGRAFI ANAK
 SECARA DARING
 (ONLINE CHILD PORN)

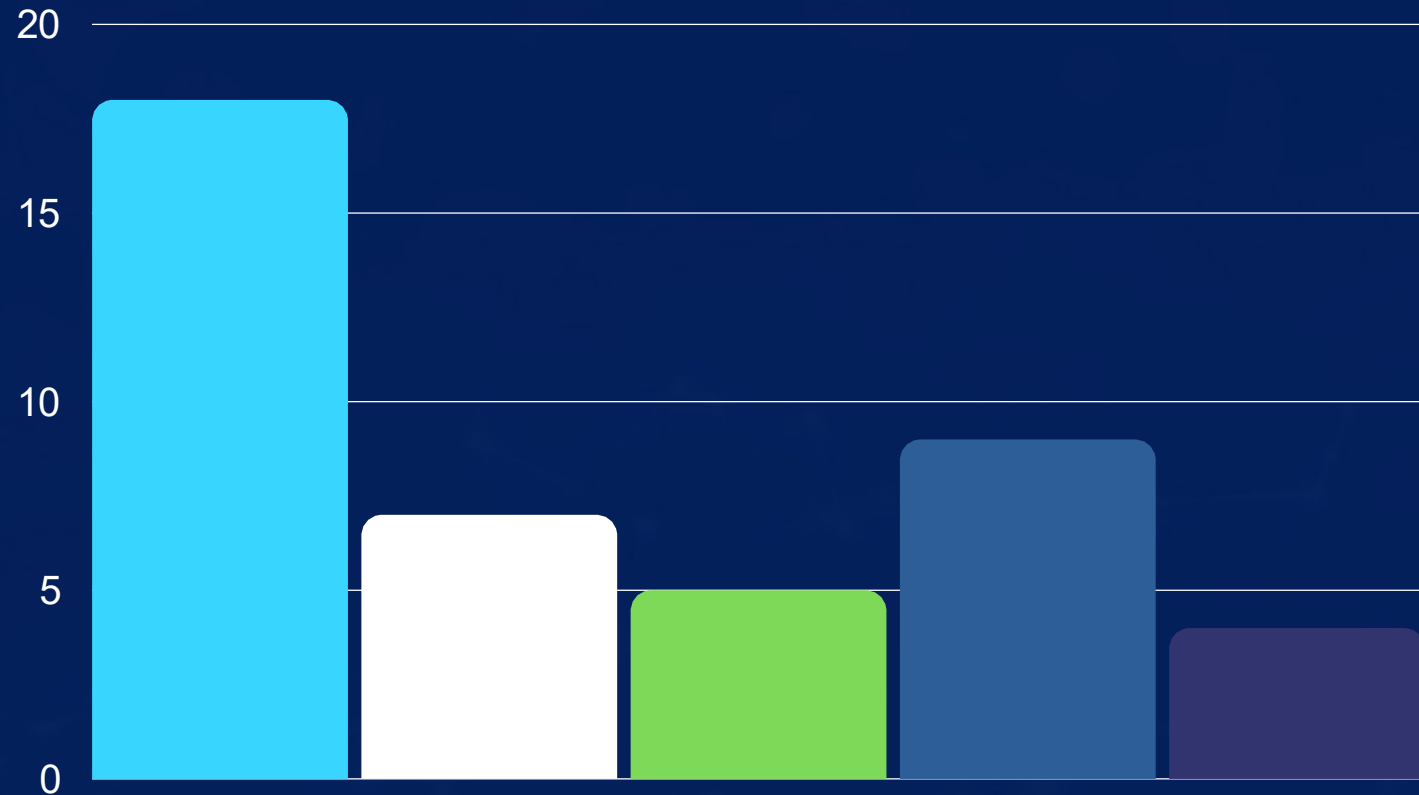


Price

Terbentuknya Satgas Anak



BERIKUT JUMLAH PENEGAKAN HUKUM (REPRESIF) PORNOGRAFI (KORBAN ANAK) YANG BERHASIL DIUNGKAP DIREKTORAT SIBER & POLDA JAJARAN

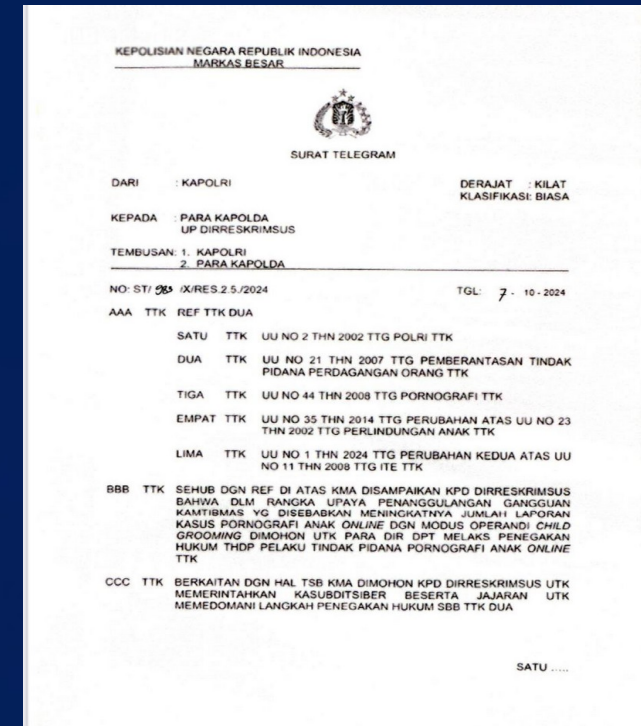
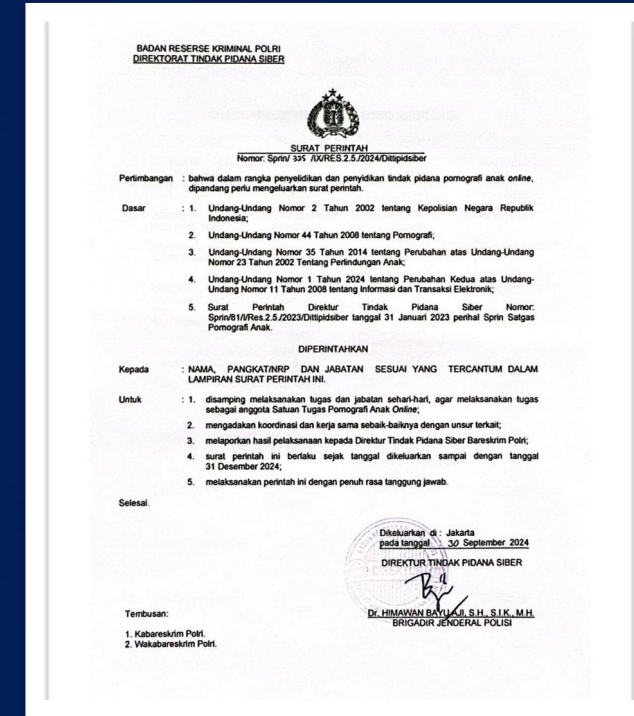


JUMLAH KASUS DARI TGL 30 SEPTEMBER 2024 DIMULAINYA SATGAS PORNOGRAFI ANAK, TELAH BERHASIL MENGUNGKAP 43 KASUS DENGAN JUMLAH TERSANGKA SEBANYAK 55 ORANG

ADAPUN SATKER YANG SUDAH MELAKUKAN GIAT REPRESIF/ PENGUNGKAPAN, ANTARA LAIN:

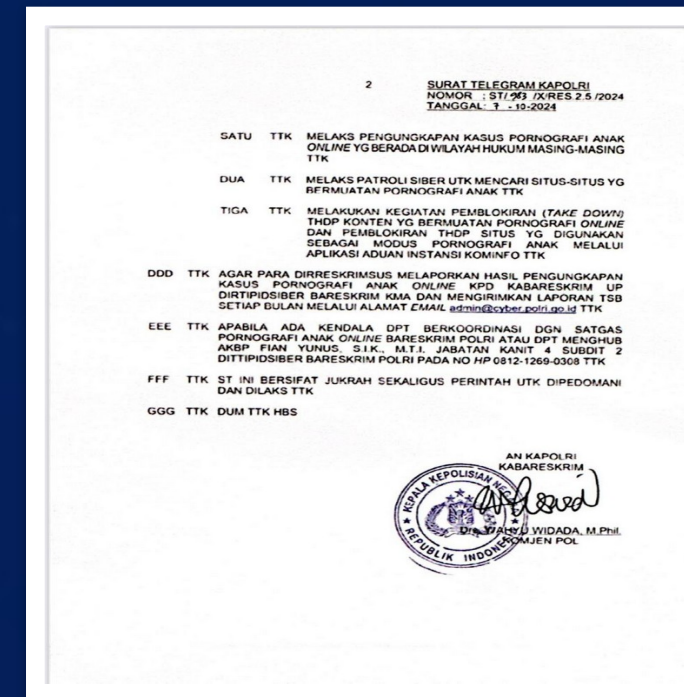
- DIREKTORAT SIBER (4 KASUS, 7 TERSANGKA)
- POLDA JATENG (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- POLDA PAPUA BARAT (1 KASUS, 1 TERSANGKA)
-) POLDA JATIM (8 KASUS, 8 TERSANGKA)
- POLDA METRO JAYA (4 KASUS, 4 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA RIAU (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA RIU (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- POLDA DIY (2 KASUS, 2 TERSANGKA)

- POLDA KALTENG (10 KASUS, 18 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA JABAR (1 KASUS, 1 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA SUMSEL (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA KEPRI (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA BALI (2 KASUS, 2 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA SULSESL (1 KASUS, 1 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA NTB (1 KASUS, 2 TERSANGKA)
- TERSANGKA) POLDA KALBAR (1 KASUS, 1 TERSANGKA)



2 LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIR TIPIOSIBER
NOMOR : SPRIN/ES IX/RES.2.5/2024/DITTIPIOSIBER
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024

1	2	3	4	5
13.	ADHYTYA LAELNUR RAHMAN	BRIPDA/01090530	BHAYANGKARA OPERASIONAL PELAKSANA PEMULA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
14.	KHAIJUDDIN, S.E., S.H., M.SI	AKBPI/75081270	KANIT 1 SUBDIT 1 DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI	KATIM SIDIK 1
15.	FARUQY NAILUFAR, S.H.	IPDA/87070068	PANIT UNIT 1 SUBDIT 1 DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI	ANGGOTA
16.	OLAN MAROJAHAN, S.H.	IPDA/88090562	BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA
17.	DODDY ARIEFIANA, S.H.	IPDA/83080100	BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA
18.	EDY HENDRO FOLANA, S.A.B.	IPDA/82041322	BKO BHAYANGKARA OPERASIONAL PENYELIA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA
19.	ANDRA DWI SETIAWAN	BRIPTU/94050898	BKO BHAYANGKARA OPERASIONAL PELAKSANA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA
20.	FRADITYA ANUGRAH PERDANA	BRIPTU/95010750	BKO BHAYANGKARA OPERASIONAL PELAKSANA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA
21.	GERRY JOHANNES NOVALINO PASARIBU	BRIPTU/96110466	BKO BHAYANGKARA OPERASIONAL PELAKSANA PEMULA DITTIPIOSIBER BARESKRIM POLRI (UNIT 1 SUBDIT 1)	ANGGOTA





Place



... Promotion



ANTISIPASI KONTEN NEGATIF DI INTERNET TERKAIT RADIKALISME DAN PORNOGRAFI...

business-law.binus.ac.id

<https://business-law.binus.ac.id/2024/10/29/antisipasi-konten-negatif-di-internet-terkait-radikalisme-dan-pornografi-anak/>

22.01

Diteruskan



FGD Antisipasi Konten Negatif di Internet Terkait Radikalisme dan Pornografi Anak - Metropolitan Post
Jakarta – Dalam rangka mengantisipasi konten negatif di...
metropolitanpost.id

<https://metropolitanpost.id/fgd-antisipasi-konten-negatif-di-internet-terkait-radikalisme-dan-pornografi-anak/>

15.02

Diteruskan



FGD Antisipasi Konten Negatif di Internet Terkait Radikalisme dan Pornografi Anak
JAKARTA: Dalam rangka mengantisipasi konten negatif di Internet yaitu terkait radikalisme dan pornografi anak, AKBP...
portalkriminal.id

FGD Antisipasi Konten Negatif di Internet Terkait Radikalisme dan Pornografi Anak <https://portalkriminal.id/2024/11/05/fgd-antisipasi-konten-negatif-di-internet-terkait-radikalisme-dan-pornografi-anak/>

15.02




IMPLEMENTASI PROPER AKBP KHAIRUDDIN, SE, SH, M Si PESERTA PKN II ANGKATAN XXXI TA 2024

www.youtube.com

<https://youtu.be/1VGe5svvAZk>

09.29



TikTok

Kunjungi TikTok untuk menemukan video!
Tonton, ikuti, dan temukan lebih banyak konten yang sedang trending.
vt.tiktok.com

<https://vt.tiktok.com/ZSjpFC6hN/>

23.47



FGD Antisipasi Konten Negatif di Internet Terkait Radikalisme dan Pornografi Anak
JAKARTA: Dalam rangka mengantisipasi konten negatif di Internet yaitu terkait radikalisme dan pornografi anak,
indonesianews.tv

FGD Antisipasi Konten Negatif di Internet Terkait Radikalisme dan Pornografi Anak <https://indonesianews.tv/2024/11/05/fgd-antisipasi-konten-negatif-di-internet-terkait-radikalisme-dan-pornografi-anak/>

10.41



Customer



Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Adopsi Proper



Pengembangan kompetensi merupakan aspek penting dalam proyek perubahan ini untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat, terutama penyidik dan tim pendukung, memiliki keahlian yang memadai untuk mencegah dan menangani pornografi anak secara daring. Implementasi strategi ini melibatkan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kapasitas teknologi, dan pendekatan multidisiplin untuk mengatasi tantangan di dunia maya



Dengan implementasi strategi ini, proyek perubahan diharapkan dapat menciptakan sistem penanganan kejahatan yang lebih tangguh, terutama dalam melindungi anak-anak dari ancaman pornografi daring.



Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

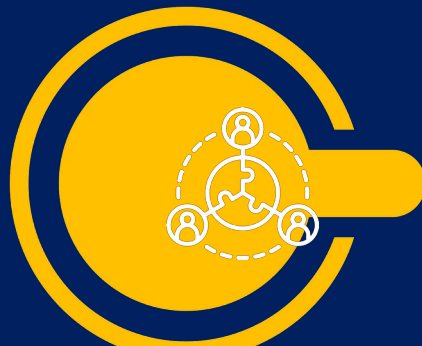
01 Edukasi Stakeholder

Mengadakan pelatihan, seminar atau workshop untuk memperkenalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring



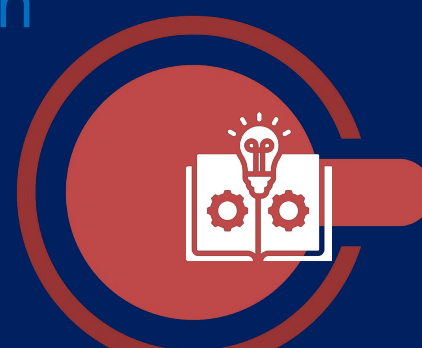
02 Pelibatan Stakeholder

Transparan dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring untuk memberikan informasi mengenai pelayanan dumas pencegahan dan penanganan pornografi anak secara



03 Manajemen Pengetahuan

Berkolaborasi dengan ahli-ahli dalam bidang pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring dan teknologi informasi untuk mengembangkan pengelolaan pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring yang lebih baik



Menuju organisasi yang adaptif



Kampanye Perubahan 06

Menyebarkan informasi terkait perubahan dan kemajuan proyek perubahan melalui sosial media maupun melalui rapat

Evaluasi Berkala 05

Untuk mengukur kemajuan pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring, mengevaluasi kinerja stakeholder dan mengidentifikasi dumas pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring secara berkala



Keterbukaan Informasi 04

Melakukan koordinasi rutin antar kelompok kerja lintas unit kerja



Sebelum

Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Sesudah

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : KHAIRUDDIN, SE, SH, M.Si **Nama Mentor** : JEFFRI DIAN JUNIARTA, S.I.K., S.H., M.H.
NIP : 75081270 **NIP** : 74060709
Jabatan : KANIT I SUBDIT I DITTPIDSIBER BARESKRIM P **Jabatan** : KASUBDIT I DITTPIDSIBER BARESKRIM POLRI
Instansi : POLRI **Instansi** : POLRI
Program : 0

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	8,33	8,00	8,00	8,11	Baik
Mentor	9,00	8,00	7,40	8,13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,80	8,00	7,58	8,13	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi


9,00-10	Istimewa
7-8,99	Baik
5-6,99	Cukup
3-4,99	Kurang
1-2,99	Sangat Kurang


Akhir Sikap Perilaku

8,13
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

Peserta: 
 KHAIRUDDIN, SE, SH, M.Si
 AKBP NRP 75081270

Mentor: 
 JEFFRI DIAN JUNIARTA, S.I.K., S.H., M.H.
 KOMBES POL NRP 74060709

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : KHAIRUDDIN, SE, SH, M.Si **Nama Mentor** : JEFFRI DIAN JUNIARTA, S.I.K., S.H., M.H.
NIP : 75081270 **NIP** : 74060709
Jabatan : KANIT I SUBDIT I DITTPIDSIBER BARESKRIM P **Jabatan** : KASUBDIT I DITTPIDSIBER BARESKRIM POLRI
Instansi : POLRI **Instansi** : POLRI
Program : 0

	Nilai Komponen			Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan		
Peserta	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa	

Keterangan Kualifikasi

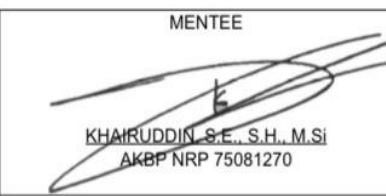
9,00-10	Istimewa
7-8,99	Baik
5-6,99	Cukup
3-4,99	Kurang
1-2,99	Sangat Kurang

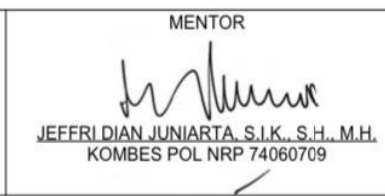
Akhir Sikap Perilaku

9,00
Kualifikasi:
Istimewa

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang lebih menantang
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan tinggi pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama

MENTEE: 
 KHAIRUDDIN, SE, SH, M.Si
 AKBP NRP 75081270

MENTOR: 
 JEFFRI DIAN JUNIARTA, S.I.K., S.H., M.H.
 KOMBES POL NRP 74060709

Strategi Pengembangan Diri

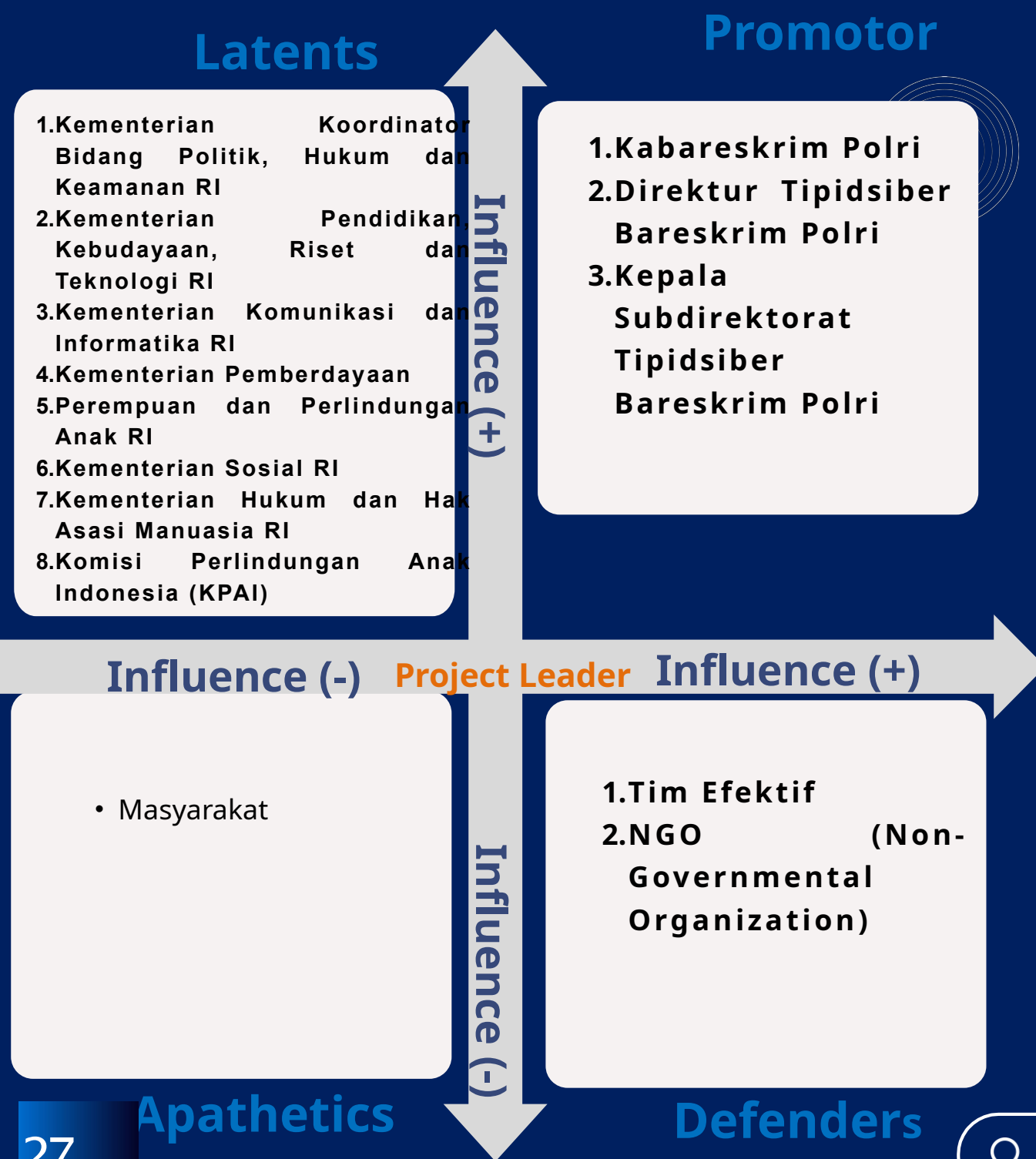


No	Panduan Intervensi	Panduan Intervensi	Pengembangan Kompetensi
1	Integritas	Kemampuan dalam menentukan tindakan, arahan, atau keputusan tertentu yang didahului dengan pertimbangan berdasarkan data maupun informasi relevan pada situasi yang mengandung risiko bagi	Mengembangkan sikap kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi dan membimbing individu maupun kelompok dalam menghadapi perubahan serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas
2	Kerjasama	Kemampuan dalam membangun hubungan komunikasi, koordinasi, serta interaksi social lainnya dengan pihak-pihak internal organisasi maupun eksternal dalam rangka menunjang kelancaran kinerja serta proses bisnis organisasi	Mengelola perubahan melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan diri bidang transformasional leadership lainnya kepada seluruh tim dalam pelaksanaan kolaborasi proyek perubahan khususnya bagian DIRTIPIDSIBER Mabes Polri
3	Pengelolaan Perubahan	Kemampuan dalam beradaptasi dan mengatasi perubahan serta mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk dapat memberikan dampak positif bagi diri pribadi dan organisasi	Menginspirasi, memotivasi dan membimbing individu maupun kelompok menghadapi perubahan khususnya DIRTIPIDSIBER Mabes Polri

Peta Stakeholder

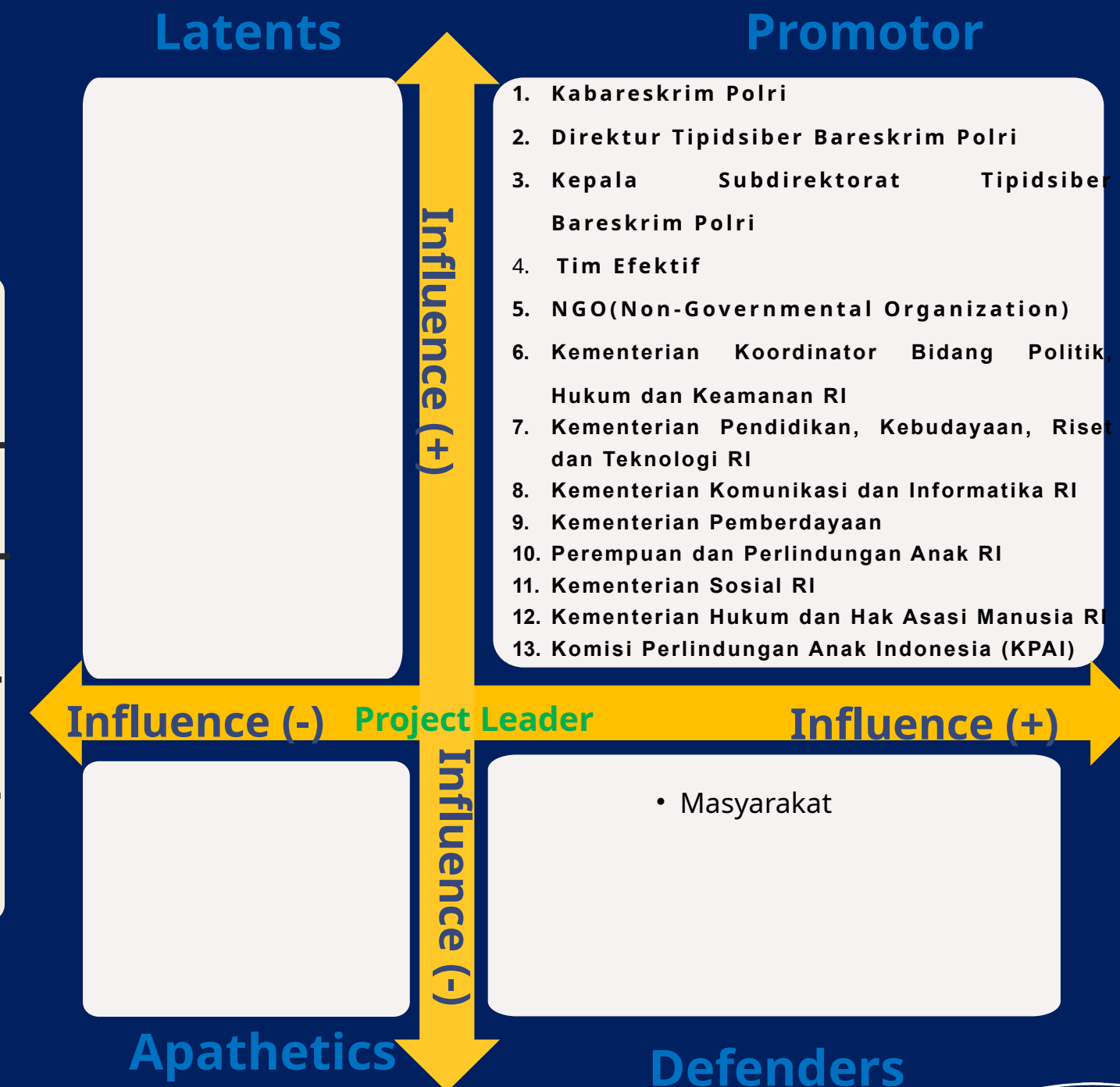
SEBELUM

SESUDAH



Strategi Komunikasi

No	Kelompok Stakeholder	Strategi Komunikasi
1	Promotors	Koordinasi
2	Latents	Focus Grup Discussion Konsultasi
3	Defenders	Koordinasi Edukasi
4	Apathetics	Audensi Edukasi



... Keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan



Subjek	Rencana Aksi
Project Leader	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring kepada Jajaran Polda (Rencana Jangka Menengah)• Peyusunan draft MoU pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring (Rencana Jangka Panjang)• Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan SDM yang melaksanakan pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring berbasis teknologi informasi di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)• Monitoring dan evaluasi implementasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring dan MoU pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)
Tim Efektif	<ul style="list-style-type: none">• Penyelenggaraan Sosialisasi SOP pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring ke Polda Jajaran (Rencana Jangka Menengah)• Melakukan sosialisasi melalui media sosial secara berkala (Rencana Jangka Menengah)• Monitoring dan evaluasi implementasi Draft MoU pencegahan dan penanganan pornografi anak secara daring melalui kegiatan FGD di Polda Jajaran (Rencana Jangka Panjang)

Keberlanjutan Implementasi Proyek Perubahan



FORMULIR PELAKSANAAN MENTORING

MENTEE		MENTOR	
1 NAMA	: Khairuddin, S.E., S.H., M.Si	1 NAMA	: Jeffri Dian Juniarta, S.I.K., S.H., M.H.
2 NRP	: 75081270	2 NRP	: 74060709
3 PANGKAT/ GOL. RUANG	: AKBP	3 PANGKAT/ GOL. RUANG	: KBP
4 JABATAN	: Kanit 1 Subdit 1	4 JABATAN	: Kasubdit 1
5 UNIT KERJA	: Dittipsiber Bareskrim Polri	5 UNIT KERJA	: Dittipsiber Bareskrim Polri

TUJUAN: APA YANG INGIN SAYA CAPAI?

KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN/ AKSI PERUBAHAN

TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (1)	BASELINE TARGET (2)	TARGET (3)	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET (4)
JANGKA MENENGAH	1. Melaksanakan sosialisasi SOP dan pelatihan kepada penyidik terkait Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak pada Direktorat Siber Polda Jajaran 2. Melaksanakan FGD di universitas wilayah Indonesia baik secara offline dan online	Januari 2025 s/d Desember 2025	1. Terlaksana sosialisasi SOP dan pelatihan kepada penyidik terkait Pencegahan dan Penanganan Pornografi Anak secara Daring pada Direktorat Siber Polda Jajaran 2. Terlaksana FGD di universitas wilayah Indonesia baik secara offline dan online	1. Monitoring penyebaran konten pornografi anak secara daring 2. Monitoring penegakan hukum
JANGKA PANJANG				

FAKTA: DIMANA SAYA SEKARANG?

TAHAP	TARGET SKP (5)	PROGRES PENCAPAIAN TARGET (6)	MASALAH/ HAMBATAN (7)	PENYEBAB (8)
JANGKA MENENGAH	Pelaksanaan sosialisasi SOP dan Pelatihan kepada penyidik beberapa wilayah	Terlaksananya Analisa dan Evaluasi secara periode	Pembiayaan sosialisasi dan pelatihan	Belum tercantum dalam DIPA
JANGKA PANJANG	Pelaksanaan sosialisasi SOP dan Pelatihan kepada penyidik ke seluruh wilayah	Terlaksananya Analisa dan Evaluasi serta pembaharuan SOP dan Pelatihan		

PELUANG: APA YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK PERUBAHAN/ AKSI PERUBAHAN UNTUK MENCAPAI TARGET JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG (9)

LANGKAH KEDEPAN: APA YANG AKAN SAYA LAKUKAN KE DEPAN?

TAHAP	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (10)	STRATEGI UNTUK MENGATASI MASALAH/ HAMBATAN (11)
JANGKA MENENGAH	Pelaksanaan sosialisasi SOP dan Pelatihan beberapa wilayah	Melaporkan rencana kebutuhan kepada Direktur
JANGKA PANJANG	Pelaksanaan sosialisasi SOP dan Pelatihan seluruh wilayah	Melaporkan rencana kebutuhan kepada Direktur

MENTEE KHAIRUDDIN, S.E., S.H., M.Si AKBP NRP 75081270	MENTOR JEFFRI DIAN JUNIARTA, S.I.K., S.H., M.H. KOMBES POL NRP 74060709
--	--

Keterangan:

- (1) Diisi dengan indikator kinerja individu pada tahap jangka pendek dengan satuan ukuran kualitatif dan kuantitatif;
- (2) Diisi dengan *baseline* target capaian implementasi dengan satuan ukuran kualitatif;
- (3) Diisi dengan target keberlanjutan proyek perubahan/ aksi perubahan pada tahap jangka menengah dan jangka panjang;
- (4) Diisi dengan strategi pencapaian target keberlanjutan proyek perubahan/ aksi perubahan pada tahap jangka menengah dan jangka panjang;
- (5) Diisi dengan komitmen keberlanjutan proyek perubahan/ aksi perubahan dalam target SKP pada tahap jangka menengah berdasarkan *baseline* target tahap jangka pendek;
- (6) Diisi dengan progres pencapaian target, berdasarkan *baseline* target tahap jangka pendek;
- (7) Diisi dengan potensi masalah/ hambatan pada tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (8) Diisi dengan penyebab masalah/ hambatan pada tahap jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (9) Diisi dengan capaian keterlibatan tim efektif dan peningkatan jumlah stakeholders dalam kuadran *promoters* pada hasil implementasi proyek perubahan/ aksi perubahan;
- (10) Diisi dengan indikator kinerja individu untuk memastikan tercapainya target pada tahap jangka menengah dan jangka panjang dengan satuan ukuran kualitatif dan kuantitatif, dan
- (11) Diisi dengan strategi mitigasi penanganan masalah/ hambatan pada tahap jangka menengah dan jangka panjang.

*Pilih salah satu sesuai jenjang pelatihan

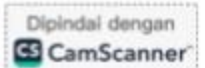
Formulir Dialog Tim Efektif dan Stakeholders

NO	Identitas Peserta	
1	Nama	: Dodi Haryansah, S.H., M.H.
2	NRP	: 72100642
3	Pangkat/ Gol	: AKBP
4	Jabatan	: Kanit 3 Subdit 2
5	Unit Kerja	: Dittipsiber Bareskrim Polri

NO	Jenis Aktor/ Peran	Identitas Aktor/ Peran (1)	Bentuk Dialog (2)	Potensi Dukungan (3)
1	Tim Efektif	1. AKP Diaz Mertha Prawitasari, S.Kom., M.H. 2. Ipda Joko Dwianto, S.E. 3. Brigpol Aprilia Utami, S.H. 4. Brigpol. Amos, S.Kom., M.H. 5. Brigpol. Jeffrey Suya Putra, S.H., M.H.	- Tatap muka - Komunikasi Whatapps	- Pelaksana proyek perubahan
2	Stakeholder Internal	1. Brigjen Dr. Himawan Bayu Aji, S.I.K. M.H. 2. KBP. Dani Kustoni, S.H., S.I.K., M.Hum. 3. KBP. Alfis Suhaili, S.I.K, M.Si.	- Tatap muka - Komunikasi Whatapps	- Pimpinan - Mentor
3	Stakeholder Eksternal	1. KBP Sutriyono (BNPT) 2. Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. (akademisi) 3. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H. 4. Zulfahmi Ramli (Yayasan Indonesia Raya)	- Tatap muka - Komunikasi Whatapps	Mitra Kerja

Jakarta, 30 November 2024
Peserta

KHAIRUDDIN, S.E., S.H., M.Si
AKBP NRP 75081270





Mata Pelajaran Pilihan



DUKUNGAN MENGGUNAKAN BIG DATA DALAM MENGANALISIS SUATU PERMASALAHAN

Dengan adanya dumas secara online terkait pornografi anak maka diperlukan sarana dan prasarana berupa database yang didapat dari stakeholders eksternal & NGO untuk dilakukan analisis dalam melakukan pengungkapan suatu perkara dan memberikan pelayanan yang transparan, cepat, akuntabel

DUKUNGAN BADAN HAK ASASI MANUSIA

Melalui Lembaga Hak Asasi Manusia diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak ketika berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku dalam hal ini terkait dengan pornografi anak.

DUKUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum terkait perbuatan pelaku pornografi anak sehingga korban mendapatkan pelayanan dan keadilan dalam penegakan hukum





Terima Kasih

